



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦶꦠꦤꦼꦠꦶꦏꦠꦺꦴꦢꦶꦏꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti Nomor 2 B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dan hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan, dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah
9. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 305/KPTS/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Tindak Lanjut Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 305/KPTS/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Lampiran I berisi kertas kerja dan identifikasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan berdasarkan Program Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR);

- KETIGA : Lampiran II memuat Penjelasan Teknis Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025;
- KEEMPAT : Kegiatan pengawasan dalam Lampiran I dapat diubah apabila ada kegiatan baru yang mendesak terkait Kebijakan Pusat, Propinsi DIY atau perintah Kepala Daerah/Bupati baik langsung maupun tidak langsung;
- KELIMA : Dalam melakukan tugas pengawasan, Inspektur menerbitkan surat perintah tugas kepada tim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua Tim wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit), Pengawasan Kinerja, Pengawasan Keuangan, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Hasil Reviu dan Laporan Monitoring kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu setelah direviu secara berjenjang;
- KEENAM : Inspektorat Daerah dalam melaksanakan Program Kerja sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KETUJUH : Segala biaya akibat ditemukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 31 Desember 2024

INSPEKTUR,



LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor ~~033~~ /KPTS/2024
Tentang Tindak Lanjut Keputusan Bupati Gunungkidul
Nomor 305/KPTS/2024 tentang Program Kerja
Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2025

KERTAS KERJA DAN IDENTIFIKASI PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERDASARKAN PROGRAM PENGAWASAN BERBASIS RISIKO (PPBR) TAHUN 2025

[illegible]

No	Misi	Tingkat Daerah			Sasaran Daerah			Program Daerah			Sasaran PD			Program	Indikator Program	Sasaran	Data Capaian pada Tahun Akal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Membina Pembinaan	PD Penanggung Jawab	Informasi terkait Misi dan TL, Rencana Kerja, Kebijakan
		Tipe	Indikator Tipe	Tipe	Indikator Tipe	Tipe	Indikator Tipe	Tipe	Indikator Tipe	Tipe	Indikator Tipe	Tipe	Indikator Tipe							
1.	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	

[illegible]

No	Mdi	Tupai Daerah				Sasaran Daerah				Program Daerah				Sasaran PD				Program	Indikator Program	Sasaran	Target Sasaran PD Tahun				Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tingkat Kinerja Program dan Kinerja Perencanaan	PD Peninggang Jawa	Informasi terkait temuan dan T. Polusi Pasat, Kasus Hukum
		Tupai	Indikator Tupai Daerah	Target Tupai Daerah		Sasaran	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran	Target	Program	Program	Indikator Sasaran PD	Sasaran	Target Sasaran PD Tahun														
				2020	2021																							
11	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21			

[illegible]

[illegible]

**Draft Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis dan Operasional OPD**

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Periode yang dinilai

: Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
: 2025
: Periode RPJMD Tahun 2021-2026

**DAFTAR NILAI KOMPOSIT RISIKO PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NO	Unit Kerja	Risiko Inherent		Keterangan
		Nilai	Skala	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sekretariat Daerah	17	4	KK terlampir
2	Sekretariat DPRD	17	4	
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17	4	
4	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	17	4	
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	17	4	
6	Inspektorat Daerah	17	4	
7	Kapanewon Wonosari	13	3	
8	Kapanewon Paliyan	13	3	
9	Kapanewon Panggang	14	3	
10	Kapanewon Tepus	14	3	
11	Kapanewon Rongkop	14	3	
12	Kapanewon Semanu	14	3	
13	Kapanewon Ponjong	13	3	
14	Kapanewon Karangmojo	13	3	
15	Kapanewon Playen	13	3	
16	Kapanewon Nglipar	13	3	
17	Kapanewon Ngawen	14	3	
18	Kapanewon Semin	13	3	
19	Kapanewon Patuk	13	3	
20	Kapanewon Saptosari	13	3	
21	Kapanewon Gedangsari	13	3	
22	Kapanewon Girisubo	13	3	
23	Kapanewon Tanjungsari	13	3	
24	Kapanewon Purwosari	13	3	
25	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	17	4	
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17	4	
27	Satuan Polisi Pamong Praja	17	4	
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	17	4	
29	Dinas Pendidikan	17	4	
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19	4	
31	Dinas Pemuda dan Olahraga	17	4	
32	Dinas Kesehatan	17	4	
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17	4	
34	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja	17	4	
35	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17	4	
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	17	4	
37	Dinas Pertanian dan Pangan	17	4	
38	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	17	4	
39	Kudha Kabudayan	17	4	
40	Dinas Pariwisata	17	4	
41	Dinas Perdagangan	17	4	
42	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	19	4	
43	Dinas Komunikasi Dan Informatika	17	4	
44	Dinas Perhubungan	16	4	
45	Dinas Lingkungan Hidup	17	4	
46	Kudha Niti Mandala Sarta Tata Sasana	17	4	
47	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17	4	


 INSPEKTUR
 SAPTOYO, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
 NIP 197103251991011001

DAFTAR TINGKAT KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO DAN PEMBOBOTAN REGISTER RISIKO STRATEGIS PEMDA
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	Sasaran	Kematangan MR	Strategi Pengawasan	Pembobotan Register Risiko	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	3		70%	SPIP level 3
2	Ketenraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat	3		70%	
3	Derajat Kualitas SDM meningkat	3		70%	
4	Angka pengangguran dan Jumlah Penduduk miskin	3		70%	
5	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian	3		70%	
6	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	3		70%	
7	Nilai Investasi Meningkat	3		70%	

INSPEKTUR



SAPTOYO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP.197103251991011001

DAFTAR TINGKAT KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO DAN PEMBOBOTAN REGISTER RISIKO UNIT KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	Unit Kerja	Kematangan MR	Strategi Pengawasan	Pembobotan Register Risiko	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sekretariat Daerah	3		70%	SPIP level 3
2	Sekretariat DPRD	3		70%	
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3		70%	
4	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	3		70%	
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	3		70%	
6	Inspektorat Daerah	3		70%	
7	Kapanewon Wonosari	3		70%	
8	Kapanewon Paliyan	3		70%	
9	Kapanewon Panggang	3		70%	
10	Kapanewon Tepus	3		70%	
11	Kapanewon Rongkop	3		70%	
12	Kapanewon Semanu	3		70%	
13	Kapanewon Ponjong	3		70%	
14	Kapanewon Karangmojo	3		70%	
15	Kapanewon Playen	3		70%	
16	Kapanewon Nglipar	3		0%	
17	Kapanewon Ngawen	3		70%	
18	Kapanewon Semin	3		70%	
19	Kapanewon Patuk	3		70%	
20	Kapanewon Saptosari	3		70%	
21	Kapanewon Gedangsari	3		70%	
22	Kapanewon Girisubo	3		70%	
23	Kapanewon Tanjungsari	3		70%	
24	Kapanewon Purwosari	3		70%	
25	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3		70%	
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3		70%	
27	Satuan Polisi Pamong Praja	3		70%	
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3		70%	
29	Dinas Pendidikan	3		70%	
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3		70%	
31	Dinas Pemuda dan Olahraga	3		70%	
32	Dinas Kesehatan	3		70%	
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3		70%	
34	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja	3		70%	
35	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3		70%	
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	3		70%	
37	Dinas Pertanian dan Pangan	3		70%	
38	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3		70%	
39	Kudha Kabudayan	3		70%	
40	Dinas Pariwisata	3		70%	
41	Dinas Perdagangan	3		70%	
42	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	3		70%	
43	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3		70%	
44	Dinas Perhubungan	3		70%	
45	Dinas Lingkungan Hidup	3		70%	
46	Kudha Niti Mandala Sarta Tata Sasana	3		70%	
47	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3		70%	

INSPEKTUR
SAPTOYO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP 197103251991011001

PERTIMBANGAN MANAJEMEN: ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	SASARAN	Anggaran	Persentase terhadap Belanja Langsung (%)	Skala
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	648.250.065.888	31,58	5
2	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat	52.389.409.659	2,55	2
3	Derajat Kualitas SDM meningkat	1.102.031.313.281	53,69	5
4	Angka pengangguran dan Jumlah Penduduk miskin	19.262.283.806	0,94	1
5	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian	86.940.009.812	4,24	2
6	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	127.605.352.718	6,22	3
7	Nilai Investasi Meningkat	15.924.565.072	0,78	1
	Total Belanja	2.052.403.000.236		


INSPEKTUR
SARTOYO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP 197103251991011001

**PERTIMBANGAN MANAJEMEN: ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No	Nama OPD	Anggaran	Persentase terhadap Belanja Langsung (%)	Skala
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sekretariat Daerah	27.354.208.429	1,28	1
2	Sekretariat DPRD	59.947.390.930	2,81	2
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.005.558.165	0,38	1
4	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	421.938.676.483	19,77	5
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	125.777.443.799	5,89	3
6	Inspektorat Daerah	8.531.585.774	0,40	1
7	Kapanewon Wonosari	1.962.936.370	0,09	1
8	Kapanewon Paliyan	2.072.491.098	0,10	1
9	Kapanewon Panggang	2.189.049.020	0,10	1
10	Kapanewon Tepus	1.916.088.233	0,09	1
11	Kapanewon Rongkop	1.842.252.364	0,09	1
12	Kapanewon Semanu	1.772.603.034	0,08	1
13	Kapanewon Ponjong	1.796.655.964	0,08	1
14	Kapanewon Karangmojo	1.804.579.539	0,08	1
15	Kapanewon Playen	1.826.554.460	0,09	1
16	Kapanewon Nglipar	1.818.824.861	0,09	1
17	Kapanewon Ngawen	2.065.690.546	0,10	1
18	Kapanewon Semin	1.797.006.124	0,08	1
19	Kapanewon Patuk	1.922.310.632	0,09	1
20	Kapanewon Saptosari	1.915.407.591	0,09	1
21	Kapanewon Gedangsari	2.443.232.448	0,11	1
22	Kapanewon Girisubo	1.881.086.669	0,09	1
23	Kapanewon Tanjungsari	2.071.918.900	0,10	1
24	Kapanewon Purwosari	1.726.001.064	0,08	1
25	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7.163.572.197	0,34	1
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.508.076.053	0,35	1
27	Satuan Polisi Pamong Praja	8.796.794.706	0,41	1
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6.205.000.575	0,29	1
29	Dinas Pendidikan	699.317.997.551	32,77	5
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.970.462.437	0,28	1
31	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	18.681.389.442	0,88	1
32	Dinas Kesehatan	371.024.638.214	17,39	5
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.685.577.777	0,74	1
34	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja	8.670.784.104	0,41	1
35	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.930.297.454	0,47	1
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.373.738.564	0,63	1
37	Dinas Pertanian dan Pangan	25.951.710.309	1,22	1
38	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12.626.823.296	0,59	1
39	Kundha Kabudayan	22.330.804.076	1,05	1
40	Dinas Pariwisata	12.632.384.865	0,59	1
41	Dinas Perdagangan	13.474.507.789	0,63	1
42	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	99.695.639.521	4,67	2
43	Dinas Komunikasi Dan Informatika	21.023.385.450	0,99	1
44	Dinas Perhubungan	24.590.955.114	1,15	1
45	Dinas Lingkungan Hidup	21.398.975.403	1,00	1
46	Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana	16.456.443.007	0,77	1
47	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.830.493.022	0,23	1
	Total Belanja	2.133.720.003.423		


 INSPEKTUR
 SAPTOYO, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
 NIP 197103251991011001

PERTIMBANGAN MANAJEMEN: KETERKAITAN DENGAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PEMDA, RPJMN, DAN YANG TERMASUK SEKTOR UNGGULAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	SASARAN	TERKAIT LANGSUNG DENGAN TUJUAN/ SASARAN RPJMD	PROGRAM Mendukung RPJMN	Prioritas Daerah	NILAI	SKALA
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	1	1	1	3	1
2	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	1	1	1	3	1
3	Derajat Kualitas SDM meningkat	1	1	2	4	2
4	Angka pengangguran dan Jumlah Penduduk miskin menurun	1	1	4	6	4
5	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat m	1	1	5	7	5
6	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	1	1	2	4	2
7	Nilai investasi Meningkat	1	1	5	7	5

INSPEKTUR

SAPTOYO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP 197103251991011001

**PERTIMBANGAN MANAJEMEN: KETERKAITAN DENGAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PEMDA, RPJMN, DAN YANG TERMASUK SEKTOR
UNGGULAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NO	NAMA OPD PENGAMPU UTAMA URUSAN	TERKAIT LANGSUNG DENGAN TUJUAN/ SASARAN RPJMD	PROGRAM MENDUKUNG RPJMN	PRIORITAS DAERAH	NILAI	SKALA
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sekretariat Daerah	1	1	1	3	1
2	Sekretariat DPRD	1	1	1	3	1
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	1	3	1
4	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1	1	1	3	1
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	1	1	1	3	1
6	Inspektorat Daerah	1	1	1	3	1
7	Kapanewon Wonosari	1	1	1	3	1
8	Kapanewon Paliyan	1	1	1	3	1
9	Kapanewon Panggang	1	1	1	3	1
10	Kapanewon Tepus	1	1	1	3	1
11	Kapanewon Rongkop	1	1	1	3	1
12	Kapanewon Semanu	1	1	1	3	1
13	Kapanewon Ponjong	1	1	1	3	1
14	Kapanewon Karangmojo	1	1	1	3	1
15	Kapanewon Playen	1	1	1	3	1
16	Kapanewon Nglipar	1	1	1	3	1
17	Kapanewon Ngawen	1	1	1	3	1
18	Kapanewon Semin	1	1	1	3	1
19	Kapanewon Patuk	1	1	1	3	1
20	Kapanewon Saptosari	1	1	1	3	1
21	Kapanewon Gedangsari	1	1	1	3	1
22	Kapanewon Girisubo	1	1	1	3	1
23	Kapanewon Tanjungsari	1	1	1	3	1
24	Kapanewon Purwosari	1	1	1	3	1
25	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1	1	1	3	1
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	1	3	1
27	Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	1	3	1
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1	1	1	3	1
29	Dinas Pendidikan	1	1	2	4	2
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	1	2	4	2
31	Dinas Pemuda dan Olahraga	1	1	2	4	2
32	Dinas Kesehatan	1	1	2	4	2
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	1	2	4	2
34	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja	1	1	4	6	4
35	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1	4	6	4
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	1	5	7	5
37	Dinas Pertanian dan Pangan	1	1	5	7	5
38	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	1	5	7	5
39	Kudha Kabudayan	1	1	5	7	5
40	Dinas Pariwisata	1	1	5	7	5
41	Dinas Perdagangan	1	1	5	7	5
42	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	1	1	2	4	2
43	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1	1	2	4	2
44	Dinas Perhubungan	1	1	2	4	2
45	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	2	4	2
46	Kudha Niti Mandala Sarta Tata Sasana	1	1	5	7	5
47	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	1	5	7	5


INSPEKTUR
SAPTOYO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP.197303201981011001

**PERTIMBANGAN MANAJEMEN: TINDAK LANJUT TEMUAN, POTENSI FRAUD & KASUS HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NO	Sasaran	KRITERIA				Nilai	Skala
		Penyelesaian Temuan Auditor Internal ≤ 95%	Penyelesaian Temuan Auditor Eksternal ≤ 90%	Potensi Fraud	Kasus Hukum		
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	0	0	0	0	0	1
2	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	0	0	0	0	0	1
3	Derajat Kualitas SDM meningkat	0	0	0	0	0	1
4	Angka pengangguran dan Jumlah Penduduk miskin menurun	0	0	1	0	1	2
5	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	0	0	0	0	0	1
6	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	0	0	1	1	2	3
7	Nilai Investasi Meningkat	0	0	0	0	0	1

INSPEKTUR



SAPTOYO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP 197103251991011001

PERTIMBANGAN MANAJEMEN: TINDAK LANJUT TEMUAN, POTENSI FRAUD & KASUS HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	NAMA OPD PENGAMPU UTAMA URUSAN	KRITERIA				Nilai	Skala
		Penyelesaian Temuan Auditor Internal ≤ 95%	Penyelesaian Temuan Auditor Eksternal ≤ 90%	Potensi Fraud	Kasus Hukum		
1	Sekretariat Daerah	0	0	0	0	0	1
2	Sekretariat DPRD	0	0	1	0	1	2
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	0	0	1
4	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	0	0	1	0	1	2
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	0	0	0	0	0	1
6	Inspektorat Daerah	0	0	0	0	0	1
7	Kapanewon Wonosari	0	0	0	0	0	1
8	Kapanewon Paliyan	0	0	0	0	0	1
9	Kapanewon Panggang	0	0	0	0	0	1
10	Kapanewon Tepus	0	0	0	0	0	1
11	Kapanewon Rongkop	0	0	0	0	0	1
12	Kapanewon Semanu	0	0	0	0	0	1
13	Kapanewon Ponjong	0	0	0	0	0	1
14	Kapanewon Karangmojo	0	0	0	0	0	1
15	Kapanewon Playen	0	0	0	0	0	1
16	Kapanewon Nglipar	0	0	1	0	1	2
17	Kapanewon Ngawen	0	0	0	0	0	1
18	Kapanewon Semin	0	0	0	0	0	1
19	Kapanewon Patuk	0	0	0	0	0	1
20	Kapanewon Saptosari	0	0	0	0	0	1
21	Kapanewon Gedangsari	0	0	0	0	0	1
22	Kapanewon Girisubo	0	0	0	0	0	1
23	Kapanewon Tanjungsari	0	0	0	0	0	1
24	Kapanewon Purwosari	0	0	0	0	0	1
25	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0	0	0	0	0	1
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0	0	0	1
27	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	0	0	0	1
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0	0	0	0	0	1
29	Dinas Pendidikan	0	0	1	0	0	2
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0	0	0	1
31	Dinas Pemuda dan Olahraga	0	0	0	0	0	1
32	Dinas Kesehatan	0	0	1	1	1	3

**PERTIMBANGAN MANAJEMEN: ISU TERKINI
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NO	Sasaran	KRITERIA				Nilai	Skala
		Sorotan Masyarakat	Isu Nasional	Layanan Publik	Hajat Hidup Orang Banyak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat			1		1	2
2	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat		1	1	1	3	4
3	Derajat Kualitas SDM meningkat	1	1	1	1	4	5
4	Angka pengangguran dan Jumlah Penduduk miskin menurun	1	1	1	1	4	5
5	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	1	1	1	1	4	5
6	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	1	1	1	1	4	5
7	Nilai Investasi Meningkat	1	1	1	1	4	5

INSPEKTUR

SAPTOYO, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
 NIP. 197103251991011001

PERTIMBANGAN MANAJEMEN: ISU TERKINI
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	NAMA OPD PENGAMPU UTAMA URUSAN	KRITERIA					Nilai	Skala
		Sorotan Masyarakat (4)	Isu Nasional (5)	Layanan Publik (6)	Hajat Hidup Orang Banyak (7)			
(1)	(3)						(8)	(9)
1	Sekretariat Daerah						0	1
2	Sekretariat DPRD						0	1
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						0	1
4	Badan Keuangan Dan Aset Daerah						0	1
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah						0	1
6	Inspektorat Daerah						0	1
7	Kapanewon Wonosari			1			1	2
8	Kapanewon Paliyan			1			1	2
9	Kapanewon Panggang			1			1	2
10	Kapanewon Tepus			1			1	2
11	Kapanewon Rongkop			1			1	2
12	Kapanewon Semanu			1			1	2
13	Kapanewon Ponjong			1			1	2
14	Kapanewon Karangmojo			1			1	2
15	Kapanewon Playen			1			1	2
16	Kapanewon Nglipar			1			1	2
17	Kapanewon Ngawen			1			1	2
18	Kapanewon Semin			1			1	2
19	Kapanewon Patuk			1			1	2
20	Kapanewon Saptosari			1			1	2
21	Kapanewon Gedangsari			1			1	2
22	Kapanewon Girisubo			1			1	2
23	Kapanewon Tanjungsari			1			1	2
24	Kapanewon Purwosari			1			1	2
25	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1		1		1	3	4
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	1	1	1	4	5

NO	NAMA OPD PENGAMPU UTAMA URUSAN	KRITERIA					Nilai	Skala
		Sorotan Masyarakat	Isu Nasional	Layanan Publik	Hajat Hidup Orang Banyak			
27	Satuan Polisi Pamong Praja		1	1	1	3	4	
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1	1			2	3	
29	Dinas Pendidikan	1	1	1	1	4	5	
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		1	1		2	3	
31	Dinas Pemuda dan Olahraga	1	1	1		3	4	
32	Dinas Kesehatan	1	1	1	1	4	5	
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	1	1	1	4	5	
34	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja	1	1	1	1	4	5	
35	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1	1	1	4	5	
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	1	1	1	4	5	
37	Dinas Pertanian dan Pangan	1	1	1	1	4	5	
38	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	1	1	1	4	5	
39	Kundha Kabudayan	1	1	1		3	4	
40	Dinas Pariwisata	1	1	1	1	4	5	
41	Dinas Perdagangan	1	1	1	1	4	5	
42	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	1	1	1	1	4	5	
43	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1	1	1	1	4	5	
44	Dinas Perhubungan	1	1	1		3	4	
45	Dinas Lingkungan Hidup							
46	Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana	1	1	1	1	4	5	
47	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	1	1	1	4	5	



PENYUSUNAN PRIORITAS AREA PENGAWASAN
KELOMPOK OPOKECAMATAN/UMUM/UNIT KERJA LAINNYA
PEMERINTAH PROVINSI KABUPATEN KOTA XYZ

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	LEVEL MR	BOBOT RISIKO INHEREN	RISIKO INHEREN		ANGGARAN		SIGNIFIKANSI OPD ATAS RPJMD		TEMUAN DAN TL POTENSI FRAUD		ISU TERKINI		Pertimbangan Manajemen Lainnya					FAKTOR RISIKO		TOTAL	TINGKAT RISIKO	Frekuensi Pengawasan	20XX	X+1	X+2	X+3	X+4
				Nilai Risiko	Skala	Anggaran	%	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	x-Thin Audit Terakhir	Bobot: 10%	Pengalaman Apip	Skala	Pemantauan KCH	Bobot: 100%	Bobot Faktor Risiko	Nilai Faktor Risiko								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)		
1	UNIT KERAJAPO																											
1	Sekretariat Daerah	3	70%	17	4	27.354.206.426	1,28	1	3	1	0	1	0	1	2	3	PERNAH 5 KALI	5			30%	1,4	3,2	Tripp				
2	Sekretariat DPRD	3	70%	17	4	59.947.390.930	2,81	2	3	1	1	2	0	1	1	1	PERNAH 5 KALI	5			30%	1,65	3,3	Tripp				
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	70%	17	4	8.005.558.165	0,38	1	3	1	0	1	0	1	2	3	PERNAH 5 KALI	5			30%	1,4	3,2	Tripp				
4	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	3	70%	17	4	421.936.676.483	19,77	5	3	1	1	2	0	1	2	3	PERNAH 5 KALI	5			30%	2,6	3,6	Sangat Tripp				
5	Badan Kependidikan, Pendidikan, dan Penelitian Daerah	3	70%	17	4	125.777.443.796	5,89	3	3	1	0	1	0	1	2	3	PERNAH 5 KALI	5			30%	1,9	3,4	Tripp				
6	Inspekturat Daerah	3	70%	17	4	6.531.565.774	0,40	1	3	1	0	1	0	1	6	3	PERNAH 5 KALI	5			30%	1,6	3,3	Tripp				
7	Kaparewon Wonorejo	3	70%	13	3	1.962.936.370	0,09	1	3	1	0	1	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			30%	1,35	2,5	Sedang				
8	Kaparewon Paltaji	3	70%	13	3	2.072.481.098	0,10	1	3	1	0	1	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			30%	1,35	2,5	Sedang				
9	Kaparewon Panggah	3	70%	14	3	2.189.040.020	0,10	1	3	1	0	1	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			30%	1,35	2,5	Sedang				
10	Kaparewon Tepus	3	70%	14	3	1.916.080.233	0,09	1	3	1	0	1	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			30%	1,35	2,5	Sedang				
11	Kaparewon Ringloj	3	70%	14	3	1.842.252.364	0,09	1	3	1	0	1	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			30%	1,35	2,5	Sedang				
12	Kaparewon Semanu	3	70%	14	3	1.772.603.034	0,08	1	3	1	0	1	1	2	2	3	PERNAH 5 KALI	5			30%	1,55	2,6	Sedang				
13	Kaparewon Ponjeng	3	70%	13	3	1.796.655.964	0,08	1	3	1	0	1	1	2	2	3	PERNAH 5 KALI	5			30%	1,75	2,8	Sedang				
14	Kaparewon Karangmajo	3	70%	13	3	1.804.579.539	0,08	1	3	1	0	1	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			30%	1,35	2,5	Sedang				
15	Kaparewon Playen	3	70%	13	3	1.826.554.460	0,09	1	3	1	0	1	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			30%	1,35	2,5	Sedang				
16	Kaparewon Ngilar	3	70%	13	3	1.818.824.861	0,09	1	3	1	1	2	1	2	2	3	PERNAH 5 KALI	5			30%	1,75	2,6	Sedang				
17	Kaparewon Ngawen	3	70%	14	3	2.065.690.545	0,10	1	3	1	0	1	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			30%	1,35	2,5	Sedang				
18	Kaparewon Semn	3	70%	13	3	1.797.006.124	0,08	1	3	1	0	1	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			30%	1,35	2,5	Sedang				
19	Kaparewon Patuk	3	70%	13	3	1.822.310.632	0,09	1	3	1	0	1	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			30%	1,35	2,5	Sedang				
20	Kaparewon Septozari	3	70%	13	3	1.915.407.591	0,09	1	3	1	0	1	1	2	3	3	PERNAH 5 KALI	5			30%	1,75	2,6	Sedang				
21	Kaparewon Gedangsari	3	70%	13	3	2.443.232.448	0,11	1	3	1	0	1	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			30%	1,35	2,5	Sedang				
22	Kaparewon Gribubo	3	70%	13	3	1.881.086.659	0,09	1	3	1	0	1	1	2	3	3	PERNAH 5 KALI	5			30%	1,75	2,6	Sedang				
23	Kaparewon Tanjungari	3	70%	13	3	2.071.918.900	0,10	1	3	1	0	1	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			30%	1,35	2,5	Sedang				
24	Kaparewon Purucarti	3	70%	13	3	1.726.001.064	0,08	1	3	1	0	1	1	2	1	1	PERNAH 5 KALI	5			30%	1,35	2,5	Sedang				
25	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3	70%	17	4	7.163.572.197	0,34	1	3	1	0	1	3	4	1	1	PERNAH 5 KALI	5			30%	1,65	3,3	Tripp				
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	70%	17	4	7.508.070.053	0,35	1	3	1	0	1	4	5	2	3	PERNAH 5 KALI	5			30%	2	3,4	Sangat Tripp				
27	Satuan Polisi Pamong Praja	3	70%	17	4	8.796.794.706	0,41	1	3	1	0	1	3	4	2	3	PERNAH 5 KALI	5			30%	1,85	3,4	Tripp				

PENYUSUNAN PRIORITAS AREA PENGAWASAN
KELOMPOK KALURAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)		FAKTOR RISIKO KEUANGAN										FAKTOR RISIKO NON KEUANGAN										Frekuensi Pengawasan	20XX	X+1	X+2	X+3	X+4			
	Kalurahan	Kapanewon	FAKTOR RISIKO KEUANGAN										FAKTOR RISIKO NON KEUANGAN																Pertimbangan Manajemen Lainnya	TOTAL	
			(3)										(4)																	TOTAL RISIKO	
(1)	(2)		1	2	1	1	5	1	1	1	2	4	1	1	1	2	4	1	1	(7)	(8)	(9)	(10)								
1	Wonosari	Wonosari	1	2	1	1	5	1	1	1	1	2	4	1	1	37,5	rendah			37,5	rendah	2 s.d 3 tahun sekali									
2	Kepok	Wonosari	1	2	1	2	5	1	1	1	1	1	4	1	1	34,2	rendah			34,2	rendah	2 s.d 3 tahun sekali									
3	Piyaman	Wonosari	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	2	1	4	25,0	sangat rendah			25,0	sangat rendah	4 tahun sekali									
4	Gari	Wonosari	1	1	1	2	5	1	1	1	1	1	2	1	1	26,3	sangat rendah			26,3	sangat rendah	4 tahun sekali									
5	Karangtengah	Wonosari	1	1	1	2	5	1	1	1	1	1	2	1	1	26,3	sangat rendah			26,3	sangat rendah	4 tahun sekali									
6	Selang	Wonosari	2	1	1	1	5	1	1	1	1	1	2	1	1	26,3	sangat rendah			26,3	sangat rendah	4 tahun sekali									
7	Baleharjo	Wonosari	1	3	1	2	5	1	1	1	1	1	2	1	1	28,8	sangat rendah			28,8	sangat rendah	4 tahun sekali									
9	Putulan	Wonosari	1	1	1	2	5	1	1	1	1	2	1	1	1	26,3	sangat rendah			26,3	sangat rendah	4 tahun sekali									
10	Warung	Wonosari	1	2	1	1	5	1	1	1	1	1	4	1	1	32,9	rendah			32,9	rendah	2 s.d 3 tahun sekali									
11	Duwet	Wonosari	2	2	1	2	5	1	1	1	1	1	4	1	1	35,4	rendah			35,4	rendah	2 s.d 3 tahun sekali									
12	Mulo	Wonosari	1	1	1	2	5	1	1	1	2	2	1	1	1	27,5	sangat rendah			27,5	sangat rendah	4 tahun sekali									
13	Wunung	Wonosari	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	4	1	1	31,7	rendah	5		31,7	rendah	2 s.d 3 tahun sekali									
14	Karangrejek	Wonosari	1	2	1	2	5	1	1	1	1	1	5	1	1	37,5	rendah			37,5	rendah	2 s.d 3 tahun sekali									
15	Natah	Nglipar	1	1	1	1	5	1	1	1	1	2	4	5	1	46,3	sedang			46,3	sedang	2 s.d 3 tahun sekali									
16	Pitangrejo	Nglipar	1	2	1	2	5	1	1	1	1	1	4	1	1	34,2	rendah			34,2	rendah	2 s.d 3 tahun sekali									
17	Kedungpoh	Nglipar	1	1	1	2	5	1	1	1	3	2	1	1	1	28,8	sangat rendah			28,8	sangat rendah	4 tahun sekali									
18	Pengkol	Nglipar	1	1	1	2	5	1	1	1	1	1	4	1	1	32,9	rendah			32,9	rendah	2 s.d 3 tahun sekali									
19	Kedungkeris	Nglipar	1	1	1	2	5	1	1	1	1	1	5	1	1	49,6	sedang			49,6	sedang	2 s.d 3 tahun sekali									
20	Nglipar	Nglipar	2	1	1	5	5	1	1	1	3	4	1	1	1	40,4	sedang			40,4	sedang	2 s.d 3 tahun sekali									
21	Katongan	Nglipar	1	1	1	1	5	1	1	1	3	4	1	1	1	34,2	rendah			34,2	rendah	2 s.d 3 tahun sekali									
22	Banyusoco	Playen	1	2	1	1	5	1	1	1	1	2	1	1	1	22,9	sangat rendah			22,9	sangat rendah	4 tahun sekali									
23	Plembutan	Playen	1	1	1	2	5	1	1	1	1	1	2	1	1	26,3	sangat rendah			26,3	sangat rendah	4 tahun sekali									
24	Bleberan	Playen	1	3	1	2	5	1	1	1	1	1	4	1	1	35,4	rendah			35,4	rendah	2 s.d 3 tahun sekali									
25	Getas	Playen	1	3	1	2	5	1	1	1	1	2	1	1	1	28,8	sangat rendah			28,8	sangat rendah	4 tahun sekali									
26	Dengok	Playen	1	1	1	2	5	1	1	1	1	1	4	1	1	32,9	rendah			32,9	rendah	2 s.d 3 tahun sekali									
27	Ngulut	Playen	1	1	1	2	5	1	1	1	3	2	1	1	1	28,8	sangat rendah			28,8	sangat rendah	4 tahun sekali									
28	Playen	Playen	2	2	1	2	5	1	1	1	1	1	2	1	1	26,4	sangat rendah			26,4	sangat rendah	4 tahun sekali									
29	Ngawu	Playen	1	2	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	33,8	rendah			33,8	rendah	2 s.d 3 tahun sekali									
30	Bandung	Playen	2	3	1	1	5	1	1	1	3	2	1	1	4	30,0	sangat rendah			30,0	sangat rendah	4 tahun sekali									
31	Logandeng	Playen	1	1	1	2	5	1	1	1	2	2	1	1	1	27,5	sangat rendah			27,5	sangat rendah	4 tahun sekali									
32	Gading	Playen	1	1	1	5	5	1	1	1	1	2	1	1	1	30,0	sangat rendah			30,0	sangat rendah	4 tahun sekali									
33	Banaran	Playen	2	2	1	2	5	1	1	1	1	1	4	1	1	35,4	rendah			35,4	rendah	2 s.d 3 tahun sekali									
34	Nyeni	Playen	2	2	1	1	5	1	1	1	2	2	1	1	5	28,8	sangat rendah			28,8	sangat rendah	4 tahun sekali									
35	Bunder	Patuk	1	1	1	2	5	1	1	1	1	1	2	1	1	26,3	sangat rendah			26,3	sangat rendah	4 tahun sekali									
36	Beji	Patuk	2	2	1	2	5	1	1	1	1	2	5	1	1	40,0	rendah			40,0	rendah	2 s.d 3 tahun sekali									
37	Pengkok	Patuk	2	3	1	2	5	1	1	1	1	1	2	1	1	30,0	sangat rendah			30,0	sangat rendah	4 tahun sekali									
38	Semoyo	Patuk	2	2	1	2	5	1	1	1	2	2	1	1	1	30,0	sangat rendah			30,0	sangat rendah	4 tahun sekali									
39	Salam	Patuk	2	5	1	2	5	1	1	1	2	4	1	2	2	40,4	sedang			40,4	sedang	2 s.d 3 tahun sekali									

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)		FAKTOR RISIKO KEUANGAN										FAKTOR RISIKO NON KEUANGAN										Pertimbangan Manajemen Lainnya	TOTAL		Frekuensi Pengawasan	20XX	X+1	X+2	X+3	X+4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Kulturahan	Kapanewon	(3)										(4)											Bobot: 100%	TOTAL RISIKO							TINGKAT RISIKO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			3	1	1	1	5	5	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1											2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)		FAKTOR RISIKO KEUANGAN										FAKTOR RISIKO NON KEUANGAN										Pertimbangan Manajemen Lainnya		TOTAL		Frekuensi Pengawasan	20XX	X+1	X+2	X+3	X+4			
	Kalurahan	Kapanewon																					Bobot: 100%		TOTAL RISIKO	TINGKAT RISIKO									
			(1)	(3)										(4)										(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
124	Kanigoro	Septosari	1	2	1	2	5	1	1	1	3	2	1	1										30,0	sangat rendah	4 tahun sekali									
125	Monggil	Septosari	1	2	1	1	5	1	1	1	2	2	1	1										27,5	sangat rendah	4 tahun sekali									
126	Planjan	Septosari	1	1	1	1	5	1	1	1	3	4	1	1										34,2	rendah	2 s.d 3 tahun sekali									
127	Balong	Girisubo	1	5	1	2	5	1	1	1	1	5	5	1										54,6	Tinggi	1 tahun sekali									
128	Jepitu	Girisubo	1	5	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1										27,9	sangat rendah	4 tahun sekali									
129	Karangawen	Girisubo	1	1	1	1	5	5	1	1	1	2	1	1										30,0	sangat rendah	4 tahun sekali									
130	Nglindur	Girisubo	2	2	1	2	5	1	1	1	1	5	5	1										52,1	Tinggi	1 tahun sekali									
131	Jerukwadul	Girisubo	1	1	1	2	5	1	1	1	1	4	1	1										32,9	rendah	2 s.d 3 tahun sekali									
132	Tileng	Girisubo	3	3	1	1	5	1	1	1	1	4	1	1										36,7	rendah	2 s.d 3 tahun sekali									
133	Pucung	Girisubo	1	1	1	2	5	1	1	1	1	4	1	1										32,9	rendah	2 s.d 3 tahun sekali									
134	Songbanyu	Girisubo	3	1	1	2	5	1	1	1	1	2	1	1										28,8	sangat rendah	4 tahun sekali									
135	Hargosari	Tanjungsari	2	2	1	2	5	1	1	1	1	2	1	1										28,8	sangat rendah	4 tahun sekali									
136	Kemiri	Tanjungsari	3	1	1	5	5	1	1	1	1	2	1	1										32,5	rendah	2 s.d 3 tahun sekali									
137	Kemadang	Tanjungsari	1	1	1	1	5	1	1	1	1	2	1	1										25,0	sangat rendah	4 tahun sekali									
138	Banjarejo	Tanjungsari	2	2	1	3	5	1	1	1	1	4	5	1										50,0	sedang	2 s.d 3 tahun sekali									
139	Ngasirejo	Tanjungsari	1	1	1	2	5	1	1	1	1	2	1	1										26,3	sangat rendah	4 tahun sekali									
140	Giripurwo	Purwosari	1	1	1	1	5	1	1	1	1	2	1	1										25,0	sangat rendah	4 tahun sekali									
141	Giricahyo	Purwosari	1	1	1	5	5	1	1	1	1	2	1	1										30,0	sangat rendah	4 tahun sekali									
142	Girijati	Purwosari	1	4	1	2	5	1	1	1	1	4	1	1										36,7	rendah	2 s.d 3 tahun sekali									
143	Giriasih	Purwosari	1	2	1	2	5	1	1	1	1	4	1	1										34,2	rendah	2 s.d 3 tahun sekali									
144	Giritirto	Purwosari	1	1	1	2	5	1	1	1	1	4	1	1										32,9	rendah	2 s.d 3 tahun sekali									



PRIORITAS RENCANA PENGAWASAN
TAHUN 202X+1

NO	NAMA AREA PENGAWASAN	TOTAL RISIKO	JENIS PENGAWASAN	KEBUTUHAN SDM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kap. Giri subo	2,1	Audit Ketaatan	10 HP
2	Kap. Saptosari	2,0	Audit Ketaatan	10 HP
3	Kap. Semin	2,0	Audit Ketaatan	10 HP
4	Kap. Nglipar	2,1	Audit Ketaatan	10 HP
5	Kap. Paliyan	2,0	Audit Ketaatan	10 HP
6	Kap. Rongkop	2,0	Audit Ketaatan	10 HP
7	Kap. Tanjungsari	2,0	Audit Ketaatan	10 HP
8	Kal. Jepitu, Giri subo	60,0	Audit Ketaatan	10 HP
9	Kal. Ngoro-oro, Patuk	25,0	Audit Ketaatan	10 HP
10	Kal. Hargomulyo, Gedangsari	31,0	Audit Ketaatan	10 HP
11	Kal. Genjahan, Ponjong	24,0	Audit Ketaatan	10 HP
12	Kal. Semanu, Semanu	36,0	Audit Ketaatan	10 HP
13	Kal. Girikarto, Panggang	34,0	Audit Ketaatan	10 HP
14	Kal. Kemiri, Tepus	60,0	Audit Ketaatan	10 HP
15	Kal. Mulo, Wonosari	26,0	Audit Ketaatan	10 HP
16	Kal. Monggol, Saptosari	23,0	Audit Ketaatan	10 HP
17	Kal. Getas, Playen	60,0	Audit Ketaatan	10 HP
18	Kal. Tambakromo, Ponjong	33,0	Audit Ketaatan	10 HP
19	Kal. Pampang, Paliyan	24,0	Audit Ketaatan	10 HP
20	Kal. Gedangrejo, Karangmojo	25,0	Audit Ketaatan	10 HP
21	Kal. Beji, Ngawen	31,0	Audit Ketaatan	10 HP
22	Kal. Pulutan, Wonosari	21,0	Audit Ketaatan	10 HP
23	Kal. Bunder, Patuk	29,0	Audit Ketaatan	10 HP
24	Kal. Ngalang, Gedangsari	29,0	Audit Ketaatan	10 HP
25	Kal. Ponjong, Ponjong	26,0	Audit Ketaatan	10 HP
26	Kal. Bejiharjo, Karangmojo	33,0	Audit Ketaatan	10 HP
27	Kal. Karangwuni, Rongkop	26,0	Audit Ketaatan	10 HP
28	Kal. Kemadang, Tanjungsari	45,0	Audit Ketaatan	10 HP
29	BKAD	2,5	Audit Ketaatan	10 HP
30	DPMPT		Audit Ketaatan	10 HP
31	DPP	3,16	Audit Ketaatan	10 HP
32	DINKES	3,4	Audit Ketaatan	10 HP
33	DPKUKMTK	3,0	Audit Ketaatan	10 HP
34	IRDA	2,0	Audit Ketaatan	10 HP
35	BAPPEDA	2,0	Audit Ketaatan	10 HP
36	Kal. Ngilindur, Giri subo	28,0	Audit Ketaatan	10 HP
37	Kal. Nglegi, Patuk	24,0	Audit Ketaatan	10 HP
38	Kal. Ngunut, Playen	19,0	Audit Ketaatan	10 HP
39	Kal. Kedungpoh, Nglipar	26,0	Audit Ketaatan	10 HP
40	Kal. Karangasem, Paliyan	23,0	Audit Ketaatan	10 HP
41	Kal. Giri harjo, Panggang	28,0	Audit Ketaatan	10 HP
42	Kal. Hargosari, Tanjungsari	60,0	Audit Ketaatan	10 HP
43	Kal. Tileng Giri subo	28,0	Audit Ketaatan	10 HP
44	Kal. Krambisawit, Saptosari	32,0	Audit Ketaatan	10 HP
45	Kal. Mertelu, Gedangsari	29,0	Audit Ketaatan	10 HP
46	Kal. Kedungkeris, Nglipar	22,0	Audit Ketaatan	10 HP
47	Kal. Giri jati, Purwosari	27,0	Audit Ketaatan	10 HP
48	Kal. Karangmojo, Karangmojo	31,0	Audit Ketaatan	10 HP
49	Kal. Purwodadi, Tepus	32,0	Audit Ketaatan	10 HP
50	DPMKP2KB	2,8	Audit Ketaatan	20 HP
51	Dispora	2,7	Audit Ketaatan	20 HP
52	Dinas Pariwisata	3,1	Audit Ketaatan	20 HP
53	BKPPD	2,1	Audit Ketaatan	20 HP
54	Dinas Perdagangan	3,1	Audit Ketaatan	20 HP
55	BPBD	2,3	Audit Ketaatan	20 HP
56	DPK	2,7	Audit Ketaatan	20 HP
57	SMP N 1 Giri subo		Audit Ketaatan	10 HP
58	SMP N 5 Patuk		Audit Ketaatan	10 HP
59	SMP N 2 Gedangsari		Audit Ketaatan	10 HP
60	SMP N 2 Nglipar		Audit Ketaatan	10 HP
61	SMP N 2 Giri subo		Audit Ketaatan	10 HP
62	SMP N 1 Panggang		Audit Ketaatan	10 HP
63	SMP N 3 Tanjungsari		Audit Ketaatan	10 HP
64	DPUPRKP	3,7	Audit Ketaatan	20 HP
65	Kundha Kabudayan	3,0	Audit Ketaatan	20 HP
66	Dinas Perhubungan	3,2	Audit Ketaatan	20 HP
67	Dinas Lingkungan Hidup	2,8	Audit Ketaatan	20 HP
68	DKP	3,1	Audit Ketaatan	20 HP
69	DPKH	3,1	Audit Ketaatan	20 HP
70	Diskominfo	3,2	Audit Ketaatan	20 HP
71	UPT Puskesmas Giri subo		Audit Ketaatan	10 HP
72	UPT Puskesmas Saptosari		Audit Ketaatan	10 HP
73	UPT Puskesmas Semin 1		Audit Ketaatan	10 HP
74	UPT Puskesmas Nglipar 1		Audit Ketaatan	10 HP

NO	NAMA AREA PENGAWASAN	TOTAL RISIKO	JENIS PENGAWASAN	KEBUTUHAN SDM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
75	UPT Puskesmas Paliyan		Audit Ketaatan	10 HP
76	UPT Puskesmas Rongkop		Audit Ketaatan	10 HP
77	UPT Puskesmas Tanjungsari		Audit Ketaatan	10 HP
78	SMP N 3 Semanu		Audit Ketaatan	10 HP
79	SMP N 2 Patuk		Audit Ketaatan	10 HP
80	SMP N 1 Gedangsari		Audit Ketaatan	10 HP
81	SMP N 3 Nglipar		Audit Ketaatan	10 HP
82	SMP N 3 Karangmojo		Audit Ketaatan	10 HP
83	SMP N 2 Panggang		Audit Ketaatan	10 HP
84	SMP N 2 Tanjungsari		Audit Ketaatan	10 HP

INSPEKTUR

PEMERINTAH KABUPATEN

INSPEKTUR

GUNUNGKIDUL

SAPTOYO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP 197103251991011001

Daftar Area Pengawasan yang Wajib Dimasukkan dalam PKPT (Mandatory)

No (1)	Nama Area Pengawasan (2)	Alasan Wajib (3)	Keterangan (4)
1	Reviu PBJ untuk 5 PBJ Strategis T.A 2025	Amanat peraturan	- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - IPKD MCP KPK 2025 area Pengadaan Barang dan Jasa
2	Monitoring Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	Amanat peraturan	Permendagri No 25 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021
3	Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Amanat peraturan	Permendagri nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
4	Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Pemerintah	Amanat peraturan	Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5	Advisory/Konsultasi	Amanat peraturan	Kapabilitas APIP
6	Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Pemerintah (Ev SAKIP)	Amanat peraturan	Permenpan RB nomor 88 Tahun 2021 tetang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7	Penjaminan Kualitas SPIP	Amanat peraturan	PP 60 Tahun 2008 ttg Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
8	Penilaian Kapabilitas APIP	Amanat peraturan	PP 64 Tahun 2008
9	Monitoring Capaian MCP KPK per area	Amanat KPK	IPKD MCP KPK 2025
10	Evaluasi Penyerapan Anggaran (PAPBJ)	Amanat BPKP	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
11	Evaluasi Reformasi Birokrasi	Amanat peraturan	Permenpan RB no 9 Tahun 2023
12	Probitiy Audit untuk 5 PBJ Strategis T.A 2025	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK 2025 area Pengadaan Barang dan Jasa
13	Reviu DAK Fisik	Amanat peraturan	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
14	Reviu DAU Specific Grant (Earmark)	Amanat peraturan	Permenkeu No. 211/PMK.07/2022
15	Reviu HPS untuk 5 PBJ Strategis T.A 2025	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK 2025 area Pengadaan Barang dan Jasa
16	Reviu KUA PPAS	Amanat peraturan	Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.

No	Nama Area Pengawasan	Alasan Wajib	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
17	Reviu LKPD oleh APIP	Amanat peraturan	Pemendagri No. 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua
18	Reviu RKA dan RKAP oleh APIP	Amanat peraturan	- Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan. - IPKD MCP KPK 2025 area Penyusunan Anggaran; area Penguatan APIP
19	Reviu RKPD oleh Inspektorat yang mereviu tentang kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Tahunan/ RKPD Tahun 2026 dengan RPJMD tahun pelaksanaan. Reviu RKPD dilakukan setiap tahun.	Amanat peraturan	- Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan. - IPKD MCP KPK 2025 area Perencanaan; area Penguatan APIP
20	Reviu atas Standar Harga Satuan (SHS) 2026 (sebelum penetapan SHS)	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK 2025 area Penyusunan Anggaran; area Penguatan APIP
21	Reviu atas Analisis Standar Biaya (ASB) 2026 (sebelum penetapan SHS)	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK 2025 area Penyusunan Anggaran; area Penguatan APIP
22	Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2025	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK 2025 area Pengelolaan BMD; area Penguatan APIP
23	Reviu pencegahan korupsi terkait program makan bergizi sehat yang didanai oleh APBD Tahun 2025	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK 2025 area Penguatan APIP
24	Verifikasi E LPPD & Reviu LPPD	Amanat peraturan	PP 13 tahun 19 ttg Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
25	Monitoring Desa	Amanat peraturan	Pemendagri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Jakwas)
26	Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi) Pengelolaan BKK Dana Keistimewaan	Amanat peraturan	Peraturan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan
27	Reviu P3DN	Amanat peraturan	Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2022
28	Monitoring inflasi	Amanat peraturan	Surat Mendagri
29	Pengawasan Verifikasi Hibah Air Minum	Amanat peraturan	Permen PUPR
30	Pendampingan Desa Antikorupsi	Amanat peraturan	Surat KPK
31	Audit TIK	Amanat peraturan	SPBE

No	Nama Area Pengawasan (2)	Alasan Wajib (3)	Keterangan (4)
32	Reviu APIP terkait dengan Manajemen ASN Tahun 2025. Reviu diutamakan dilaksanakan untuk melakukan pencegahan korupsi pada proses promosi, rotasi, mutasi ASN (kesesuaian dengan regulasi/ ketentuan yang berlaku dari sisi persyaratan, proses, dan substansi)	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK area Manajemen ASN; area Penguatan APIP
33	Reviu dan/atau Audit Pajak dan Retribusi Daerah	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK area Optimalisasi Penerimaan Daerah; area Penguatan APIP
34	Reviu atas layanan perizinan tahun 2025 (dipilih berdasarkan risiko tertinggi)	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK area Pelayanan Publik; area Penguatan APIP
35	Reviu atas layanan RSUD tahun 2025 (dipilih berdasarkan risiko tertinggi)	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK area Pelayanan Publik; area Penguatan APIP
36	Verifikasi data realisasi anggaran pengentasan kemiskinan ekstrim	Amanat peraturan	Surat KPK RI
37	Pengawasan CASN	Amanat peraturan	Permenpan No.
38	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko penyaluran bantuan hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan (minimal 10 bantuan sosial dengan anggaran terbesar)	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK 2025 area Perencanaan
39	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa untuk 3 OPD Strategis (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR)	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK 2025 area Pengadaan Barang dan Jasa
40	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Strategis	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK 2025 area Pengadaan Barang dan Jasa
41	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pelaksanaan e-Purchasing pada Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK 2025 area Pelayanan Publik
42	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Penerbitan Rekomendasi Teknis dan Perizinan	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK 2025 area Pelayanan Publik
43	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Penerimaan Peserta Didik Baru	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK 2025 area Pelayanan Publik
44	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko dalam Proses Pemberian Layanan Kesehatan kepada Masyarakat	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK 2025 area Pelayanan Publik
45	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko dalam Proses Pemberian Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Masyarakat	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK 2025 area Pelayanan Publik
46	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Manajemen ASN	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK area Manajemen ASN
47	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Proses Pengelolaan BMD	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK area Pengelolaan BMD

No	Nama Area Pengawasan	Alasan Wajib	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
48	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK 2025 area Optimalisasi Penerimaan Daerah
49	Reviu atas Honorarium Tahun 2025 atau Laporan Hasil Audit atas Honorarium Tahun 2024	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK 2025 area Penyusunan Anggaran; area Penguatan APIP
50	Reviu atas Perjalanan Dinas Tahun 2025 atau Laporan Hasil Audit atas Perjalanan Dinas Tahun 2024	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK 2025 area Penyusunan Anggaran; area Penguatan APIP
51	Pengawasan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK terkait Pengadaan Barang dan Jasa selama 3 tahun terakhir (Hasil Audit BPK Tahun 2022 -	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK 2025 area Pengadaan Barang dan Jasa
52	Penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasan	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK 2025 area Penguatan APIP
53	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut atas temuan Inspektorat yang terindikasi merugikan keuangan daerah tahun 2025	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK 2025 area Penguatan APIP
54	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Hibah dengan nilai terbesar tahun 2025	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK 2025 area Penguatan APIP
55	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Bantuan Sosial tahun 2025	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK 2025 area Penguatan APIP
56	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Bantuan Keuangan tahun 2025	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK 2025 area Penguatan APIP
56	Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut SPI Tahun 2024	Amanat peraturan	IPKD MCP KPK 2025 area Penguatan APIP

INSPEKTUR



ASAPTOYO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP 197103251991011001

Auditable Unit yang Tidak Masuk dalam PKPT

No	Nama OPD/Program/Kegiatan	Alasan Tidak Masuk Perencanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alkes (DAK)	Akan diaudit oleh Itjend Kemenkes	Surat Itjen Kemenkes Nomor...
2	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Akan diaudit oleh BPKP	Surat Kepala Perwakilan BPKP Nomor...
3	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi/Kemendagri	Permendagri Nomor...
4	Program Strategis Nasional	Akan diaudit oleh BPKP	Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
5	Program Belanja Luar Negri	Akan diaudit oleh BPKP	Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Petunjuk Pengisian

- Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- Diisi dengan nama Area Pengawasan Prioritas
- Diisi dengan alasan area pengawasan tidak dimasukkan dalam PKPT
- Diisi dengan keterangan atau dasar hukum/kebijakan atas pengawasan yang tidak dimasukkan dalam PKPT

INSPEKTUR



A SAPTOYO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP 197103251991011001

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

:
:
:
: PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RESIKO TAHUN 2023+1

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	TIM	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		RMP	(6)	RPL	PJ	Koord	Daltu	Dalnls	KT	AT	Jumlah			
1	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Evaluasi	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi	Pemerintah Daerah	Tim I, II, III, IV, V, VI	Mg-I Jan 2025	Mg -II Feb 2023	Mg -II Feb 2023	1	5	10	10	10	10	10	(9)	(10)	(11)
2	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Reviu	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi	Pemerintah Daerah	Tim VII & VIII	Mg-I Jan 2025	Mg -II Feb 2023	Mg -II Feb 2023	1	5	10	10	10	10	10	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi
3	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BOS	Dinas Pendidikan	Tim III	Jan-25										1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi
4	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BOK	Dinas Kesehatan	Tim IV	Jan-25										1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi
5	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	DAK	DPUPRKP	Tim V & VI	Jan-25										1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi
6	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Audit dengan Tujuan tertentu	Penanganan Aduan	DPKUKMTK	Tim VII & VIII	Jan-25										1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
7	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	BOP	Dinas Pendidikan	Tim III	Jan-25										1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi
8	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Reviu DAK PAUD, SD, SMP	Dinas Pendidikan	Tim III	Jan-25										1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi
9	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Reviu DAK Kesehatan	Dinas Kesehatan	Tim IV	Jan-25										1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi
10	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Asistensi	Tersediannya LK OPD yang memadai sesuai kaidah akuntasi pemerintahan	Perangkat Daerah	Gabungan	Jan-25										1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi
11	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Asistensi	Tersediannya LPU APBD yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan	144 Kelurahan	Gabungan	Jan-25										3 LHA	Laptop, ATK	Tinggi
12	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Evaluasi	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APSP	Perangkat Daerah dan Kelurahan	Gabungan	Jan-Des 2025										2 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
13	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Consulting	Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Kelurahan	Gabungan	Jan-Des 2025										Laporan Hasil Konsultasi	Laptop, ATK	Tinggi
14	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Audit Ketelitian	Pengelolaan Keuangan Kelurahan	Gombang, Ponjong, Kampung, Njawan	Tim I Tim II	Feb-25 Feb-25										1 LHP 1 LHP	Laptop, ATK Laptop, ATK	Tinggi Tinggi

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	TIM	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		RMP	RPL	PJ	Koord	Daltu	Dalnis	KT	AT	Jumlah				
						Feb-25								(6)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jalayu, Karangmojo Terbuh, Patuk Ngleri, Playen	Tim III Tim IV Tim V	Feb-25									1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
				Karangajek, Wonosari	Tim VI	Feb-25									1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
15	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Audit dengan Tujuan tertentu	Penanganan Aduan	Natah, Nglipar	Tim VII & VIII	Feb-25									1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
16	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Evaluasi Internal Inspektoral	Meningkatnya Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah	Inspektoral Daerah	Tim III & IV	Feb-25									1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	
17	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Reviu	Audit Charter dan Kode Etik	Inspektoral Daerah	Tim V	Feb-25									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
18	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Tersedianya laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntasi pemerintahan	Pemerintah Daerah	Gabungan	Feb-25									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
19	Pengujian Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Audit Dengan Tujuan tertentu	Pengawasan CPNS dan PPK	Pemerintah Daerah	Tim IV	Feb-25									2 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
20	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Reviu dan Asistensi MR	Pemerintah Daerah	Semua Tim	Maret 2025									8 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
21	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Proby Audit	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	PD yang memiliki pekerjaan paket strategis	Tim I - VIII	Maret 2025									5 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	
22	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Evaluasi	Tersedianya laporan kinerja Perangkat Daerah (SAKIP) yang memadai dan berkualitas	Perangkat Daerah	Tim I - VIII	Maret 2025									47 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	
23	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Monitoring Evaluasi	Moniev Efisiensi Anggaran OPD	Perangkat Daerah	Tim I - VIII	Maret 2025									8 LHM	Laptop, ATK	Tinggi	
24	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Tersedianya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) yang memadai dan berkualitas	Pemerintah Daerah	Gabungan	Maret 2025									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
25	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Monitoring Evaluasi	Moniev LHKAN	Pemerintah Daerah	Tim III & IV	Maret 2025									1 LHM	Laptop, ATK	Tinggi	
26	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Evaluasi dan Reviu	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Reviu Penyerapan PBU	Pemerintah Daerah	Tim V & VI	Maret 2025									1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	
27	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Audit Dengan Tujuan tertentu	Penanganan Aduan	Ngindur, Girsubo	Tim VII & VIII	Maret 2025									1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
28	Pengujian Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Asistensi	Optimalisasi pembangunan Reformasi Birokrasi (ZI WBK)	Perangkat Daerah	Tim I - VIII	Maret 2025									6 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	TIM	Jadwal		HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		RMP	RPL	PJ	Koord	Daltu	Dalnis	KT	AT	Jumlah			
						(6)					(7)						(12)
28	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Reviu DAU Specific Grant (Earmark)	Pemerintah Daerah	Tim VII & VIII	Maret 2025								(9)	Laptop, ATK	(11)	
30	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Audit Ketepatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa (RBU Kelurahan)	Kalilekuk, Semin Sumberejo, Semin Semugih, Rongkop Girasah, Puwosari Bandung, Playen	Tim I Tim II Tim III Tim IV Tim V Tim VI Tim VII & VIII	April 2025 April 2025 April 2025 April 2025 April 2025 April 2025 April 2025								1 LHA 1 LHA 1 LHA 1 LHA 1 LHA 1 LHA 1 LHP	Laptop, ATK Laptop, ATK Laptop, ATK Laptop, ATK Laptop, ATK Laptop, ATK Laptop, ATK	Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi	
31	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	ADTT	ADTT Nalaih, Nglijar (BUMKAL dan Keuangan Kelurahan Tahun 2021)	Nalaih, Nglijar/ Sambirejo, Ngawen	Tim I-VI	April 2025								1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	
32	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Evaluasi	Evaluasi RB Ex-Ante	Perangkat Daerah	Tim VII & VIII	April 2025								1 LHM	Laptop, ATK	Tinggi	
33	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Monitoring Evaluasi	Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi) Pengelolaan BKK Dana Keistimewaan	Kalurahan	Gabungan	April 2025								1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	
34	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Evaluasi	Evaluasi RB TW 1	Pemerintah Daerah	Tim I-VI	April 2025								47 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
35	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Reviu	Reviu RUP	Pemerintah Daerah	Gabungan	April 2025								1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
36	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu/Audit	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa (P3DN)	Perangkat Daerah	Semua Tim	April 2025								1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	
37	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Audit TIK	Meningkatnya akuntabilitas layanan yang menggunakan teknologi informasi	Perangkat Daerah	Semua Tim	April 2025								1 Lap FM	Laptop, ATK	Tinggi	
38	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Penilaian Mandiri	PM KAPIP	Pemerintah Daerah	Semua Tim	April 2025								1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
39	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Meningkatnya kualitas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025	Perangkat Daerah	Tim I	Mei 2025								1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
40	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Audit Kinerja	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tanaga Kerja	Tim II	Mei 2025								1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
			Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan	Pemerintah Daerah	Tim III	Mei 2025								1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
			Derajat Kualitas SDM Meningkatkan	Pemerintah Daerah	Tim IV	Mei 2025								1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
			Derajat Kualitas SDM Meningkatkan	Pemerintah Daerah										1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	TIM	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		RMP	(6)	PJ	Koord	Daltu	Dalnis	KT	AT	Jumlah				(12)
				Pemerintah Daerah	Tim V	Mei 2025									(9)	(10)	(11)	
			Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan												1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	(12)
41	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Audit dengan Tujuan Tertentu	Derajat Kualitas SDM Meningkatkan Penanganan Aduan	Pemerintah Daerah Jurangjero, Ngawen	Tim VI Tim VII & VIII	Mei 2025 Mei 2025									1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
42	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Penilaian Mandiri	Optimalisasi pembangunan Reformasi Birokrasi pada SPSP	Perangkat Daerah	Semua Tim	Mei 2025									1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
43	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025	Perangkat Daerah	Semua Tim	Mei 2025									1 Lap PM	Laptop, ATK	Tinggi	
44	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Meningkatnya Kualitas RPJMD	Perangkat Daerah	Semua Tim	Mei 2025									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
45	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Meningkatnya Kualitas KUA-PPAS 2025 Perubahan	Perangkat Daerah	Semua Tim	Mei 2025	ctt harapannya stlh RKPD p ditetapkan								1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
46	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Evaluasi ZI WBK	Optimalisasi pembangunan Reformasi Birokrasi pada ZI WBK	Perangkat Daerah	Semua Tim	Mei 2025									1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	
47	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Audit Tata Kelola BUMD	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan BUMD	BUMD	Tim I - VI	Juni 2025									1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
48	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah (SSH, ASB dan HSPK)	BKAD	Tim VII & VIII	Juni 2025									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
49	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Reviu	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pelayanan Publik)	DPMP/TSP	Tim III	Juni 2025									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
50	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Evaluasi dan Reviu	Evaluasi Penyusunan Anggaran dan Reviu Penyusunan PBU	Pemerintah Daerah	Tim V & VI	Juni 2025									1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	
51	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Reviu DAU Specific Grant (Earmark)	Pemerintah Daerah	Tim VII & VIII	Juni 2025									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
52	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Monitoring Evaluasi	Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi) Pengelolaan BKK Dana Keselamatan	Kalurahan	Tim VII & VIII	Juni 2025									1 LHM	Laptop, ATK	Tinggi	
53	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Reviu Kinerja Daerah (Pengendalian inflasi daerah serta Kinerja Pemerintah dan Badan Usaha)	Pemerintah Daerah	Semua Tim	Juni 2025									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	TIM	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	Koord	Daltu	Dahlis	KT	AT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)					(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
54	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Monitoring Evaluasi	Money Program Makan Bergizi Gratis	Pemerintah Daerah	Semua Tim	Juni 2025									1 LHM	Laptop, ATK	Tinggi	
55	Pengujian Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Penjaminan Kualitas	Optimalisasi pembangunan Reformasi Birokrasi pada SPP	Perangkat Daerah	Semua Tim	Juni 2025									1 Lap PK	Laptop, ATK	Tinggi	
56	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Meningkatnya kualitas Renja Perubahan Tahun 2025	Perangkat Daerah	Semua Tim	Juni 2025									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
57	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Reviu MR SPBE	Pemerintah Daerah	Semua Tim	Juni 2025									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
58	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Meningkatnya Kualitas Rancangan Akhir KUA-PPAS Tahun 2026	Perangkat Daerah	Semua Tim	Juni 2025									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
59	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Meningkatnya Kualitas Rancangan Akhir Renja Tahun 2026	Perangkat Daerah	Semua Tim	Juli 2025									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
60	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Audit kelastian (Kapanewon plus opname kulturalan)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Kapanewon serta opname kas pada Kalurahan	Kapanewon Ngawen Kapanewon Ponjong Kapanewon Prilayan Kapanewon Saptosari Kapanewon Gedangsari Kapanewon Ngilar	Tim I Tim II Tim III Tim IV Tim V Tim VI Tim VII & VIII	Juli 2025 Juli 2025 Juli 2025 Juli 2025 Juli 2025 Juli 2025 Juli 2025									1 LHP 1 LHP 1 LHP 1 LHP 1 LHP 1 LHP 1 LHR	Laptop, ATK Laptop, ATK Laptop, ATK Laptop, ATK Laptop, ATK Laptop, ATK Laptop, ATK	Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi	
61	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Reviu Optimalisasi Pajak	BKAD		Juli 2025									8 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
62	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Reviu dan Asistensi MR	Pemerintah Daerah	Semua Tim	Juli 2025									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
63	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu/Audit	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa (P3GN)	Perangkat Daerah	Semua Tim	Juli 2025												
64	Pengujian Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Evaluasi	Evaluasi RB TW 2	Pemerintah Daerah	Tim I - VI	Juli 2025									1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	
65	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Honorarium Kesbangpol	Kesbangpol	Tim I	Agustus 2025									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
66	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	SPPD Sekretariat Dewan	Sekretariat Dewan	Tim II	Agustus 2025									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
67	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Audit dengan Tujuan Tertentu	ADTT Hibah Dispora	Dispora	Tim III	Agustus 2025									1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
68	Pengujian Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Audit dengan Tujuan Tertentu	ADTT PPRG	Pemerintah Daerah	Tim IV	Agustus 2025									1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
69	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Audit dengan Tujuan Tertentu	ADTT Bantuan Sosial DPUPR	DPUPR	Tim V	Agustus 2025									1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	TIM	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		RMP	RPL	PJ	Koord	Daltu	Dalnis	KT	AT	Jumlah				
						(6)					(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
70	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Reviu	Pelayanan Publik pada RSUD	Dinas Kesehatan	Tim VI	Agustus 2025									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
71	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Pengelolaan BMD	BKAD	Tim VII & VIII	Agustus 2025									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
72	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Reviu DAK PAUD, SD, SMP	Dinas Pendidikan	Tim III	Agustus 2025									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
73	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Reviu DAK Kesehatan	Dinas Kesehatan	Tim IV	Agustus 2025									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
74	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Reviu DAK Ingsasi	DPUPRKP	Tim V	Agustus 2025									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
75	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Meningkatnya Kualitas RKA Perubahan Tahun 2025	Perangkat Daerah	Semua Tim	Agustus 2025									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
76	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Meningkatnya Kualitas Revisi 2025-2029	Perangkat Daerah	Semua Tim	September 2025									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
77	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Audit Kelalaian pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Kelalaian NSPK (Tetanga Kenja)	Tim I	September 2025									1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
				Sekretariat Daerah	Tim II	September 2025									1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
				Dinas Pendidikan	Tim III	September 2025									1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
				BKPPD	Tim IV	September 2025									1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
				Dinas Parwisata	Tim V	September 2025									1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
				Dinas Pertanian dan Pangan	Tim VI	September 2025									1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
				DPMKAL	Tim VII	September 2025									1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
				Dinas Perhubungan	Tim VIII	September 2025									1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
				Dinas Pendidikan	Tim III	September 2025									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
78	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Reviu Money BOS	BKPPD	Tim IV	September 2025									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
79	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Reviu	Reviu Manajemen ASN	BKPPD	Tim V & VI	September 2025									1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	
80	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Evaluasi dan Reviu	Evaluasi Penerapan Anggaran dan Reviu Penerapan PBU	Pemerintah Daerah	Tim VII & VIII	September 2025									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
81	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Monitoring Evaluasi	Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi) Pengelolaan BKK Dana Keselamatan	Kalurahan	Tim VII & VIII	September 2025									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
82	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Reviu DAU Specific Grant (Earmark)	Pemerintah Daerah	Tim VII & VIII	September 2025									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
83	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu	Meningkatnya Kualitas RKA-PD Tahun 2026	Perangkat Daerah	Semua Tim	September 2025									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
84	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Audit Kelalaian	Kelalaian MCP (BKK dan DAIS Kalurahan)	Semin, Semin Bening, Semin Keragaman, Pallyan Pucung, Girisubo	Tim I Tim II Tim III Tim IV	Oktober 2025 Oktober 2025 Oktober 2025 Oktober 2025									1 LHP 1 LHP 1 LHP 1 LHP	Laptop, ATK Laptop, ATK Laptop, ATK Laptop, ATK	Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	TIM	Jadwal		HP						Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		RMP	RPL	PJ	Koord	Daltu	Dalnis	KT	AT	Jumlah			(12)
							(6)				(7)						
						Tim V	Oktober 2025							(9)	(10)	(11)	
						Tim VI	Oktober 2025							1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
						Tim VII	Oktober 2025							1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
						Tim VIII	Oktober 2025							1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
						Semua Tim	Oktober 2025							1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
85	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Revisi/Audit	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa (P3CN)	Perangkat Daerah										1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
86	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Evaluasi	Evaluasi RB TW 3	Pemerintah Daerah	Tim I - VI	Oktober 2025								1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	
87	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Audit Keluasan	Kelastan (Pendapatan)	NSPK/SPM DPMP/TSP BKAD 1 BKAD 2 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependidikan	Tim I Tim II Tim III Tim IV Tim V Tim VI Tim VII & VIII	November 2025 November 2025 November 2025 November 2025 November 2025 November 2025 November 2025								1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
88	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Audit dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Aduan	Sekolah Rongkop										1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
89	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Revisi	Revisi MR	Perangkat Daerah	Tim I - VIII	November 2025								1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
90	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Revisi	Revisi DAK PAUD, SD, SMP	Dinas Pendidikan	Tim III	November 2025								1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
91	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Revisi	Revisi DAK Kesehatan	Dinas Kesehatan	Tim IV	November 2025								1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
92	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Revisi	Revisi DAK Ingasi	DPUP/RKP	Tim V	November 2025								1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
93	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	Audit dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan CPNS dan PPPK	BKPPD	Tim IV	November 2025								1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
94	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Evaluasi Internal Inspektoral	Meningkatnya Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah	Inspektoral Daerah	Semua Tim	November 2025								1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	
95	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Telaah Selawat	Meningkatnya Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah	Inspektoral Daerah	Semua Tim	November 2025								8 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	
96	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Asistensi	Asistensi APBKat Berbasis Risiko	Kelurahan	Semua Tim	Desember 2025								3 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	
97	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Asistensi	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah (Asistensi Asset)	Perangkat Daerah	Semua Tim	Desember 2025								8 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	TIM	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
						RMP	RPL	PJ	Koord	Daltu	Dafnis	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
98	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opname Kas	Meningkatnya kualitas pengelolaan kas dan persediaan (Opname Kas)	Perangkat Daerah	Semua Tim	Desember 2025									8 LH Opname	Laptop, ATK	Tinggi		
99	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opname Persediaan	Meningkatnya kualitas pengelolaan kas dan persediaan (Opname Persediaan)	Perangkat Daerah	Semua Tim	Desember 2025									8 LH Opname	Laptop, ATK	Tinggi		
100	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Evaluasi dan Reviu	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Reviu Penyerapan PBJ	Pemerintah Daerah	Tim V & VI	Desember 2025									1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi		
101	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Monitoring Evaluasi	Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi) Pengelolaan BKK Dana Keistimewaan	Kalurahan	Tim VII & VIII	Desember 2025									1 LHM	Laptop, ATK	Tinggi		
102	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Monitoring Evaluasi	Money Program Makan Bergizi Gratis	Pemerintah Daerah	Gabungan	Desember 2025									1 LHM	Laptop, ATK	Tinggi		
103	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Reviu/Audit	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa (P3DN)	Perangkat Daerah	Gabungan	Desember 2025									1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi		

INSPEKTUR



LA SAPTOYO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP 197103251991011001

LAMPIRAN II

Keputusan Inspektur Daerah

Kabupaten Gunungkidul

Nomor 039 /KPTS/2024

Tentang

Tindak Lanjut Keputusan Bupati

Gunungkidul Nomor 305/KPTS/2024

tentang Program Kerja Pengawasan

Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2025

PENJELASAN TEKNIS

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025

LAMPIRAN II

Penjelasan Teknis Program Kerja
Pengawasan Tahunan Tahun 2025

Nomor : 039 /KPTS/2024

Tanggal : 31 Desember 2024

1.1. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan faktor penting dalam hal mengantisipasi/mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Tolak ukur keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai dari semakin akuntabel Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dengan menurunnya penyimpangan, menurunnya temuan-temuan dan rekomendasi saat diaudit. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana diatur pada Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat memberikan jaminan keyakinan (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting*) antara lain :

- 1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 2) memberikan peringatan dini, dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
- 3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dari ketiga hal tersebut, Inspektorat Daerah telah melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah sejak dari perencanaan, pencegahan/peringatan dini sampai dengan pemeriksaan, kemudian revidi, dan evaluasi/pengukuran kinerja.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Sesuai dengan Pasal 337 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa :
“pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan” dan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menentukan bahwa "Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Tujuan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan yaitu :

1. memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan;
2. mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan bertubi-tubi.
3. meningkatkan penjamin mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap APIP;
4. meningkatkan akuntabilitas publik instansi Pemerintah Daerah;
5. memberikan peringatan dini (*early warning system*) dan meningkatkan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
6. menetapkan prioritas pengawasan yang benar-benar bersifat strategis dan bermanfaat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
7. meningkatkan kualitas aparatur pengawasan dan hasil pengawasan.

1.3. KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Audit meliputi :
 - 1) Audit Keuangan (aspek keuangan tertentu);
 - 2) Audit Kinerja; dan
 - 3) Audit Dengan Tujuan Tertentu.
2. Kegiatan Reviu yang terdiri dari :
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;
 - b. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - c. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - d. Reviu Penyerapan Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. Reviu Penyerapan Anggaran;

- f. Reviu Barang Milik Daerah (BMD);
- g. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK);
- h. Reviu Belanja Tidak Terduga (BTT);
- i. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- j. Reviu SSH, ASB, dan HSPK;
- k. Reviu Implementasi ASB;
- l. Reviu Tata Kelola Pajak Daerah;
- m. Reviu Tata Kelola Kepatuhan UKPBJ;
- n. Reviu Tata Kelola Perizinan;
- o. Reviu Manajemen ASN;
- p. Reviu Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam negeri (P3DN);
- q. Reviu lainnya sesuai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi/Pusat.

3. Kegiatan Evaluasi meliputi :

- a. Evaluasi Laporan Kinerja (LKjIP) Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
- b. Evaluasi Manajemen Risiko;
- c. Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan, dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- d. Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- e. Evaluasi Zona Integritas;
- f. Penjaminan kualitas SPIP;
- g. Kegiatan evaluasi lainnya sesuai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi/Pusat.

4. Kegiatan Monitoring, terdiri dari :

- a. Penanganan Laporan Gratifikasi;
- b. Penanganan Benturan Kepentingan;
- c. Penanganan *Whistle Blowing System (WBS)*;
- d. Pelayanan Publik;
- e. Monev Dana Keistimewaan (Danais);
- f. Monev Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
- g. Kegiatan Monitoring lainnya sesuai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi/Pusat.

5. Kegiatan Asistensi, meliputi :

- a. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
- b. Asistensi LPPD;